



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, keluarga calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Januari 2021 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.Botg Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon dan Hasbi bin Hadami adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Januari 2002 di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kutipan akta nikah nomor 109/19/III/2015;
2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon dan Hasbi bin Hadami telah lahir seorang anak perempuan bernama;

Nama : CALON ISTERI
NIK : 6474026208040005

Halaman 1 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Lahir : Bontang, 22 Agustus 2004
Umur : 16 tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa, Hasbi bin Hadami sebagai ayah kandung CALON ISTERI telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6474-KM-09112017-0004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 13 November 2017;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;
- Nama : CALON SUAMI
NIK : 6474021709000003
Tanggal Lahir : Bontang, 17 September 2000
Umur : 19 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Penghasilan : Rp. 1.000.000,-/ Bulan
Tempat Tinggal : , Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B-07/kua.16.08.01/pw.01/1/2021 tanggal 06 Januari 2021;
6. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin asmara dengan calon suaminya 8 bulan dan dikhawatirkan anak Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma asusila;
7. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa anak saya akan menikah setelah disetujui oleh Pengadilan Agama Bontang, karena anak saya belum cukup umur menurut hukum;

Halaman 3 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kami mengajukan dispensasi nikah karena umur anak saya yang bernama CALON ISTERI baru berumur 16 tahun 05 bulan, dan pihak Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak saya dengan calon suaminya karena usia anak saya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak saya dekat dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering jalan bersama;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan lamaran ke keluarga pihak mempelai perempuan dan diterima lamarannya dengan baik, dan untuk tanggal pernikahan belum dapat ditentukan tetapi secepatnya akan di lakukan proses pernikahan;
- Bahwa anak saya dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab dan status anak saya perawan dan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa anak saya dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab dan status anak saya perawan dan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa alasan mendesak pernikahan anak kami adalah karena anak kami dan calon suaminya telah lama berpacaran dan khawatir anak kami melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa kami bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak saudara dengan suaminya terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya CALON ISTERI selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon suami saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dan CALON SUAMI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan, serta saya tidak dalam pinangan orang lain selain CALON SUAMI;
- Bahwa status saya saat ini adalah perawan;

Halaman 4 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami saya sudah melamar saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa alasan saya sudah tidak bisa menunggu sampai berusia 19 tahun karena sudah lama berpacaran dan khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa saya sudah siap menanggung resiko menikah yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon isteri saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dengan CALON ISTERI sudah lama menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saya dan Aryana Arista Zahra Tiara Putri tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan;
- Bahwa status saya saat ini adalah perjaka;
- Bahwa keluarga saya telah melakukan proses lamaran dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon isteri saya;
- Bahwa alasan mendesak pernikahan saya dan CALON ISTERI karena telah lama berpacaran dan acara pernikahan telah ditetapkan;
- Bahwa tanggal pernikahan akan ditetapkan setelah persidangan dispensasi nikah ini selesai;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya siap menerima segala resiko yang timbul dari pernikahan ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan sepupu calon suami anak Pemohon bernama **SEPUPU** memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa keluarga sudah merestui dan sangat setuju CALON SUAMI menikah dengan CALON ISTERI;
- B
ahwa CALON SUAMI telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- B
ahwa alasan keluarga kami ingin segera diselenggarakan pernikahan karena Ardiansyah dan Aryana Arista Zahra Tiara Putri telah lama berpacaran dan khawatir terjerumus dalam perbuatan yang melanggar agama;
- B
ahwa kami akan bertanggung jawab penuh apabila terjadi permasalahan tentang ekonomi dan kebutuhan rumah tangga anak kami dan calon isterinya;
- B
ahwa kami bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak kami dengan isterinya terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/19/III/2015 tanggal 01 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rohani Nomor 6474020911170007 tanggal 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang Propinsi

Halaman 6 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Kalimantan Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Hasbi (bapak kandung calon mempelai perempuan) Nomor 6474-KM-09112017-0004 tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI Nomor 6474-LT-041220150008 tanggal 10 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.5;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 6474CLT060200903931 tanggal 06 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.6;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar YPPI Teluk Kadere tanggal 17 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar YPPI yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.6;

Halaman 7 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat /penolakan Keterangan perihal Penolakan kehendak nikah/rujuk Nomor B-07/kua.16.08.01/pw.01/1/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani Sawit, Tempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI bin Hamsah;
 - Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan perawan;
 - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki saya sudah datang melamar dan lamarannya diterima oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan;
 - Bahwa saya tidak tahu kapan pernikahan anak Pemohon, tetapi setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang secepatnya proses pernikahan dilaksanakan;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai kuli bangunan dan penghasilannya setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena untuk menikahkan anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa tanggal pernikahan akan ditetapkan setelah persidangan dispensasi nikah ini selesai;
 - 2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI bin Hamsah;
 - Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan perawan;
 - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki saya sudah datang melamar dan lamarannya diterima oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan;
 - Bahwa tidak tahu kapan pernikahan anak Pemohon, tetapi setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang secepatnya proses pernikahan dilaksanakan;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai kuli bangunan dan penghasilannya setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena untuk menikahkan anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai kuli bangunan dan penghasilannya setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, ayah dan ibu calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah atas anak laki-laki anak perempuan Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah lama berpacaran dan tanggal pernikahan telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bontang sehingga dapat digunakan untuk mengurus

Halaman 10 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan orang tua kandung calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan bahwa telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon selaku orang tua kandung calon mempelai perempuan serta Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan juga mengakui pernikahan mereka tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang merupakan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang secara materil menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri

Halaman 11 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan telah bercerai. Alat bukti P.2 pun menunjukkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **CALON ISTERI**, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) berupa Akta Kematian atas nama Hasbi yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan Akta kelahiran kelahiran **CALON ISTERI**, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Alat bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa calon mempelai perempuan tersebut lahir pada tanggal 22 Agustus 2004 sehingga terbukti calon mempelai wanita sudah berumur 16 tahun 5 bulan. Oleh karena itu bagi calon mempelai perempuan perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan Akta Kelahiran **CALON SUAMI** dimana alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), alat bukti tersebut membuktikan bahwa calon mempelai

Halaman 12 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lahir pada tanggal 17 September 2000 sehingga telah berusia 19 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6) yang merupakan ijazah SD atas nama **Nona Ayu Radita Rachmadani**. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir **Nona Ayu Radita Rachmadani** adalah SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7) yang merupakan ijazah Paket B atas nama **CALON SUAMI**. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir **CALON SUAMI** adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama CALON ISTERI dengan CALON SUAMI, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut selaku calon mempelai perempuan "belum cukup umur" sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan serta pacarnya sebagai calon mempelai laki-laki telah dihadirkan Pemohon dalam persidangan, meskipun keterangan yang disampaikan nya bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tersebut diperlukan untuk

Halaman 13 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan adanya kehendak untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Oleh karena itu keterangan anak Pemohon dan keterangan calon suaminya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon meskipun keterangan yang disampaikananya bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tua tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan tidak adanya pemaksaan kehendak agar anaknya dengan anak Pemohon untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Selain itu Hakim perlu mendengar secara langsung tentang persetujuan dan restunya serta kesediaannya untuk membimbing dan membantu anaknya menjalani rumah tangga bersama anak Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) telah diperoleh keterangan mengenai hubungan dan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, sehingga Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama CALON ISTERI sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria yang bernama CALON SUAMI saat ini berusia 19 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara Aryana Arista Zahra Tiara Putri dan CALON SUAMI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan, serta Aryana Arista Zahra Tiara Putri tidak dalam pinangan orang lain selain CALON SUAMI;
- Bahwa status Aryana Arista Zahra Tiara Putri adalah perawan dan CALON SUAMI adalah peraja;
- Bahwa bahwa alasan mendesak pernikahan antara Aryana Arista Zahra Tiara Putri dan CALON SUAMI adalah karena keduanya telah menjalin asmara bahkan Aryana Arista Zahra Tiara Putri cukup lama, sehingga khawatir terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTERI dengan CALON SUAMI dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa CALON SUAMI telah bekerja sebagai buruh karyawan dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangganya;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai. Bahkan anak Pemohon dan calon suami telah lama berpacaran, sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma susila. Hingga akhirnya pihak keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan

Halaman 15 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari. Waktu pernikahan telah ditetapkan. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;

Menimbang, bahwa Kaidah Fiqhiyah menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan";

Halaman 16 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk mencatat dan mengawasi semua peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang berada dalam wilayahnya dan oleh karena itu demi tertibnya administrasi pencatatan nikah maka Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk mencatatkan pernikahan CALON ISTERI dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.

M

engabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M
emberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON
ISTERI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang
bernama CALON SUAMI;
3. M
embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp189000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 1 Jumaidil Akhir 1442 Hijriah, oleh Riduansyah,
S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Bontang, penetapan ini diucapkan oleh
Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hijerah, S.H.,S.H.I, sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Hijerah, S.H., S.H.I.

Riduansyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | |
| | : Rp. 30.000,00 | |
| 2. | Biaya | Proses |
| | : Rp. 50.000,00 | |
| 3. | Panggilan | |
| | : Rp. 170.000,00 | |
| 4. | PNB | Panggilan |
| | : Rp. 20.000,00 | |

Halaman 18 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi
: Rp. 10.000,00
6. Materai
: Rp. 9.000,00
-
- Jumlah** : **Rp. 189.000,00**
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Pen.8/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)